

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Diplomasi Publik

Dalam diplomasi, dikenal istilah *Track One Diplomacy* atau Diplomasi Resmi yang memiliki sejarah panjang bermula dari masa awal sejarah manusia. De Magalhaes (1988) menjabarkan Diplomasi Resmi sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan sebagai dasar dalam menjalin dan mengembangkan hubungan antara pemerintah negara-negara yang berbeda melalui penggunaan delegasi yang diakui oleh kedua belah pihak (Magalhães, 1988). Pembeda utama *Track One Diplomacy* dari bentuk lain diplomasi adalah penerapannya dalam tingkatan pemerintah (*state-to-state level*) dengan protokol dan aturan tertentu yang diakui setiap negara. *Track One Diplomacy* dilaksanakan oleh diplomat, pejabat tingkat tinggi pemerintah, dan para kepala negara dan bertujuan untuk mempengaruhi struktur kekuasaan politik internasional. PBB, Vatikan, dan institusi regional seperti Uni Eropa, Liga Arab, dan Uni Afrika termasuk pelaku diplomasi jenis ini.

Track One Diplomacy dikembangkan sebagai instrumen khusus kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar negara-bangsa. Beberapa buku menjabarkan keunggulan dari *Track One Diplomacy* ini. Pertama, *Track One Diplomacy* mampu memanfaatkan kekuasaan politik untuk mempengaruhi arah negosiasi dan kesepakatan (Volkan, Julius, & Montville, 1991). Termasuk di dalam istilah kekuasaan ini adalah ancaman akan penggunaan kekuatan militer jika suatu negara menolak menyetujui suatu perjanjian internasional tertentu. Kedua, *Track One Diplomacy* memiliki kapasitas untuk mengakses sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat posisi dalam negosiasi (Bercovitch & Houston, 2000). Ketiga, *Track One Diplomacy* dapat digunakan sebagai sumber informasi mendalam atas kepentingan dan

motif partisipan berdasarkan sumber-sumber intelijen yang beragam (Crocker, Hampson, & Aall, 1996). Keempat, mediator dalam *Track One Diplomacy* memiliki kompetensi untuk menggunakan informasi dan pengetahuan dari kebijakan luar negeri negaranya sendiri, serta kebijakan luar negeri negara lain.

Selain keunggulan, terdapat pula kelemahan dalam *Track One Diplomacy* antara lain, diplomat tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat dadakan sehingga proses negosiasi terlalu kaku dan dapat tertunda karena menunggu keputusan dari negara asal diplomat tersebut (Volkan, Julius, & Montville, 1991). Selain itu, *Track One Diplomacy* sangat terpengaruh perubahan iklim politik di negaranya.

Diplomasi tradisional atau *Track One Diplomacy* tidak dapat bekerja efektif tanpa kehadiran *Track Two Diplomacy* sejak dahulu (Volkan, Julius, & Montville, 1991). Montville mendefinisikan *Track Two Diplomacy* sebagai interaksi informal dan tidak resmi antara anggota-anggota negara-negara yang bertujuan untuk mengembangkan strategi, mempengaruhi opini publik, mengelola sumber daya manusia dan material dengan tujuan untuk membantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Montville menekankan bahwa *Track Two Diplomacy* bukan merupakan pengganti *Track One Diplomacy*, melainkan sebagai solusi atas kekakuan psikologis yang disebabkan interaksi antar representatif dalam *Track One Diplomacy*. *Track Two Diplomacy* bertujuan untuk melengkapi negosiasi resmi dalam *Track One Diplomacy* (Fisher, 2005). Contohnya adalah *Search for Common Ground*, *West African Network for Peacebuilding* (WANEP), *European Centre for Conflict Prevention* (ECCP), dan lainnya.

Diplomasi publik sendiri tergolong ke dalam *Track Two Diplomacy* karena tidak dilakukan oleh diplomat resmi suatu negara sehingga bersifat lebih fleksibel dalam pelaksanaannya dengan pencapaian hasil yang tidak kalah penting dibandingkan dengan diplomasi tradisional (*Track One Diplomacy*)

Umumnya, diplomasi publik dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat global baik di luar maupun di dalam negeri terkait dengan kebijakannya. Pemahaman demikian justru menghilangkan partisipasi publik atas diplomasi karena publik hanya dimaknai sebagai target. Oleh karena itu, diplomasi publik perlu dikonsepsikan ulang sesuai dengan perkembangan jaman di abad 21 ini. Filosofi, strategi, dan taktik diplomasi publik bergeser dari informasi searah menjadi dua arah dan interaktif dengan publik. Pertukaran dan timbal balik informasi menjadi sarana membangun kepercayaan dengan menambahkan dimensi personal dan sosial pada variabel-variabel pengaruh dan persuasi. Tujuan akhirnya adalah membangun simpati dan komitmen yang konsisten di masyarakat global, hubungan masyarakat global dengan pemerintah, perusahaan dan satu sama lain (Snow & Taylor, 2009).

2.1.2 Keamanan Nasional

Patrick Morgan mengatakan bahwa keamanan merupakan suatu kondisi, seperti kesehatan atau status, yang tidak dapat dijabarkan secara sederhana, pendapat ini sejalan dengan yang dikatakan Barry Buzan dalam bukunya *'People, States, and Fear'* bahwa hakikat keamanan sesungguhnya berbeda dari yang dipahami umum (Booth, 2007). Definisi keamanan berubah-ubah sesuai kepentingan aktornya, sehingga keamanan hanya dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kebebasan dari ancaman terhadap nilai-nilai vital. Batasan antara studi Hubungan Internasional, Ilmu Politik, dan Studi Keamanan sendiri sudah menjadi tidak jelas karena globalisasi telah membuat isu-isu dalam negeri menjadi isu luar negeri dan sebaliknya. Pemahaman mengenai keamanan berkaitan dengan hal ini menjadi meluas, isu-isu dan metode-metode yang berlaku dalam pemeliharaan keamanan sudah melampaui kekuasaan negara. Selain meluas, pemahaman mengenai keamanan juga menjadi semakin mendalam dengan mempertanyakan asumsi-asumsi tentang peristiwa masa lalu sebagai salah satu faktor penyebab rasa tidak aman. Perubahan persepsi tentang keamanan terus berubah dan

berkembang dari masa ke masa, hal ini dapat dilihat melalui teori dan pendapat mengenai keamanan dari para ahli sebagai berikut, perubahan agenda dan konseptualisasi dari keamanan menurut John Mearshimer dan Stephen Walt membuat kita tidak dapat mempelajari keamanan secara umum karena keamanan tidak bisa digeneralisasikan. Richard Schultz, Peter Katzenstein, Roy Greenwood di awal era 90-an dari *Copenhagen School* menyatakan bahwa isu mengenai keamanan nasional merupakan yang terpenting, namun konsepsinya harus diperluas melalui sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perubahan paling radikal mengenai pemahaman akan studi keamanan dinyatakan oleh Richard Ullman, Charles Kegley, dan Edward Kolodziej, yaitu studi keamanan tidak hanya mengkaji keamanan nasional akan tetapi keamanan nasional dan keamanan manusia.

Memahami rasa tidak aman tidak dapat dipisahkan dari pemahaman akan ancaman. Ancaman tradisional diantaranya adalah diplomasi dengan paksaan, perang intelijen, senjata pemusnah massal, terorisme, dan kebijakan proteksi perdagangan (*anti-dumping*). Sedangkan ancaman non-tradisional dapat berupa wabah penyakit seperti AIDS dan Ebola, tindakan kriminal yang terorganisasi antar negara, serta dampak perang terhadap anak-anak. Panel tingkat tinggi PBB mengategorikan ancaman sebagai ancaman sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya kemiskinan, wabah penyakit, dan degradasi lingkungan; konflik internal, termasuk di dalamnya perang sipil, genosida, dan tindakan tidak manusiawi skala besar lainnya; serta kejahatan terorganisir dan trans-nasional (MacLean, Black, & Shaw, 2006).

Secara tradisional, keamanan berhubungan erat dengan keselamatan (*survival*). Oleh karena itu, keamanan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk ancaman eksistensial terhadap *referent object* yang ditunjuk sehingga perwakilan negara atau penguasa dapat mendeklarasikan sebuah kondisi darurat (sekuritisasi), dan kemudian mengklaim hak atas penggunaan sumber daya demi membendung ancaman terhadap

keamanan tersebut (Buzan, Wæver, & de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 1998).

Barry Buzan membagi sektor keamanan menjadi lima. Pertama, sektor militer. Sektor ini menyangkut dua tingkatan interaksi dari kemampuan negara untuk menyerang (ofensif) dan bertahan (defensif) serta persepsi dan niat masing-masing negara. Kedua, sektor politik. Sektor ini menyangkut stabilitas organisasi negara, sistem pemerintahan dan ideologi yang memberikan legitimasi terhadap otoritas negara. Ketiga, sektor ekonomi yang di dalamnya termasuk akses terhadap sumber daya, keuangan, dan pasar yang diperlukan digunakan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan warga negara serta mempertahankan kekuasaan negara. Keempat, sektor *societal*. Sektor ini terkait dengan keberlanjutan dalam perkembangan pola tradisional bahasa, budaya, dan keagamaan serta identitas nasional dan adat istiadat. Kelima, sektor lingkungan yang berkaitan dengan pemeliharaan biosfer lokal dan planet beserta isinya sebagai sistem pendukung penting dan tempat bergantungnya kegiatan manusia dalam berkehidupan (Buzan, Wæver, & de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 1998).

Konsep pengorganisasian dalam sektor *societal* adalah identitas. Ketidakamanan *societal* muncul ketika masyarakat dari berbagai kalangan mendefinisikan pembangunan atau potensi sebagai sebuah ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka sebagai sebuah komunitas. Konsep ini berbeda dengan keeamanan sosial yang merujuk pada level individu hingga fenomena ekonomi. Keamanan *societal* merujuk pada level identitas bersama (kolektif) dan tindakan yang diambil untuk mempertahankan identitas tersebut (Buzan, Wæver, & de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 1998).

Agenda keamanan *societal* telah diatur oleh aktor-aktor berbeda dalam era dan wilayah yang berbeda. Isu-isu yang paling umum dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan *societal* diantaranya:

1. Migrasi
2. Kompetisi horizontal
3. Kompetisi vertikal

Manusia dapat membuat keputusan individu untuk melakukan migrasi dengan berbagai macam alasan mulai dari kesempatan ekonomi, tekanan lingkungan, dan kebebasan beragama. Akan tetapi, migrasi juga dapat dilakukan sebagai bagian dari program politik untuk menyeragamkan populasi dalam sebuah negara seperti yang terjadi di Tibet dan Estonia (Buzan, Wæver, & de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 1998). Dalam hal ini isu migrasi internasional merupakan salah satu bentuk ancaman non-tradisional bagi keamanan nasional. Hal ini turut menjadi permasalahan bagi Indonesia yang dijadikan sebagai negara transit bagi para imigran pencari suaka tujuan Australia.

Menurut Kusnanto Anggoro dan AA Banyu Perwita, definisi keamanan nasional bagi Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang domain, yaitu melihat cakupan keamanan nasional yang terdiri dari pertahanan eksternal, keamanan internal, ketertiban politik, dan manajemen bencana alam maupun buatan manusia. Kedua, dari sudut pandang objek, yang melihat keamanan nasional sebagai sesuatu yang mencakup keselamatan negara, keselamatan masyarakat, dan keselamatan individu. Pada dasarnya kedua sudut pandang ini tidak saling berlawanan dan saling melengkapi sehingga tujuan, tanggung jawab, dan strategi keamanan nasional harus didasarkan pada 3 pilar utama yang mengasumsikan bahwa: (a) segala ancaman tidak lagi mengenal batas-batas tradisional negara; (b) semua ancaman memiliki keterkaitan erat antara aspek militer dan non-militer, dan (c) berbagai ancaman harus diselesaikan secara simultan dalam tataran nasional, regional, dan internasional. Masalah keamanan nasional tidak hanya berkisar mengenai aktor dan hubungan-hubungannya, namun juga bagaimana mencapai keamanan tersebut, menggunakan instrumen

apa, serta siapa yang bertanggungjawab secara politik dan operasional terhadap pencapaian tersebut. Semuanya perlu dibingkai secara koheren dalam pertautan antara kebijakan, perundang-undangan, dan segenap aturan operasionalnya, serta nilai-nilai etis dalam penerapannya (Prihatono, Evangeline, & Gindarsah, 2007).

2.1.3 Konsep Diaspora

Meskipun konsep diaspora sudah lama digunakan untuk merujuk kepada kelompok manusia bentukan migrasi kolonialisme maupun industri, tidak ada definisi khusus yang digunakan sebagai acuan untuk memahami diaspora. Pada tahun 1986, Gabriel Sheffer dalam bukunya yang berjudul *A New Field of Study: Modern Diasporas in International Politics*, memberikan definisi modern terhadap diaspora sebagai kelompok etnis minoritas migran asal yang bertempat tinggal dan bertindak di negara tuan rumah, tetapi mempertahankan hubungan sentimental dan material yang kuat dengan tanah air atau negara asal mereka (Santoso, 2014).

Diaspora jenis apapun terbentuk dari rangkaian peristiwa-peristiwa yang berasal dari orientasi orang-orang, pemikiran, dan bahkan budaya, namun tidak boleh dianggap sebagai identitas terpisah dari peristiwa-peristiwa itu sendiri. Takeyuki Tsuda menunjukkan bahwa sirkulasi (perpindahan) diaspora antara tempat-tempat tujuan dan negara-negara asalnya mungkin dapat memberikan pemaknaan baru atas sebuah konsep bangsa. either by melepas rindu dengan kampung halaman (negara asal) atau perasaan dekat dengan negara tempat tinggal sebelumnya dan bahkan merindukan keduanya. Sementara Brah menambahkan bahwa diaspora dapat dimaknai sebagai serangkaian hubungan sosial dan moral yang terus menerus terbangun dari tempat dimana diaspora itu berada. Tempat ini tidak hanya merupakan daerah atau wilayah yang ditinggali oleh migran beserta keturunannya namun juga ditinggali oleh warga atau penduduk asli. Dengan demikian keberadaan diaspora terkait dengan penduduk asli yang tetap tinggal dan yang memilih untuk pindah (Quayson & Daswani, 2013).

2.1.4 Konsep Pertahanan Nirmiliter

Pertahanan nirmiliter merupakan suatu bentuk pertahanan non-konvensional dengan sumber daya utama bukan berasal dari militer. Belum ada teori yang menjelaskan mengenai pertahanan nirmiliter namun ada konsep yang mendekati pemahaman mengenai pertahanan nirmiliter yaitu pertahanan berbasis sipil (*civilian-based defense*).

Menghadapi ancaman dengan pertahanan konvensional (militer) sudah hampir pasti menimbulkan korban yang tidak sedikit atas populasi sipil. Konflik militer dengan gelar kekuatan besar-besaran dapat menimbulkan kerusakan besar atas infrastruktur, belum lagi jika dilihat kerugian dari sisi persenjataan. Dapat terjadi kemunduran atas teknologi persenjataan jika konflik terjadi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan alternatif non-militer yang dapat dilakukan atau dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai *deterrence* atau untuk mempertahankan serangan dari dalam dan dari luar.

Pertahanan berbasis sipil merupakan aplikasi yang merupakan pengembangan lebih halus dari teknik umum aksi non-kekerasan atau perlawanan non-kekerasan terhadap masalah-masalah pertahanan nasional. Pertahanan jenis ini dilakukan oleh masyarakat umum, khususnya oleh kelompok-kelompok tertentu yang paling terpengaruh dan terdampak sebagai objek serangan serta institusi terkait. Institusi yang terlibat disini tergantung atas serangan yang dilancarkan. Bervariasi tergantung sektor mana yang ingin penyerang lumpuhkan, mungkin ekonomi, ideologi, politik, dan sebagainya.

Pertahanan berbasis sipil yang dilakukan masyarakat umum beserta institusi terkait ini didasari persiapan awal, perencanaan, dan pelatihan. Tahapan-tahapan ini didasarkan atas hasil penelitian terhadap perlawanan non-kekerasan hingga analisis mendalam atas sistem politik penyerang dan penelitian yang bersifat pemecahan masalah seperti cara-cara meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat untuk terus melakukan perlawanan ketika serangan semakin parah atau bagaimana

menjaga jalur informasi dan komunikasi tetap efektif ketika sedang diserang. attack. Pemahaman atas hal-hal ini diperlukan sehingga bentuk perlawanan non-kekerasan yang dilakukan dapat seefektif mungkin dan mampu mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan-kelemahan penyerang. Ini merupakan dasar atas pengembangan strategi pertahanan berbasis sipil yang sukses.

Pertahanan berbasis sipil berpijak pada teori bahwa kekuatan politik, dalam negeri maupun luar negeri, berasal dari sumber-sumber tertentu di dalam masyarakat. Dengan mengganggu atau memutuskan sumbernya, rakyat dapat mengambil alih kekuasaan dan mengalahkan agresor asing (Sharp, 1990).

Jika melihat konsep pertahanan berbasis sipil di atas, secara garis besar sejalan dengan konsep pertahanan nirmiliter Indonesia sebagai bagian dari sistem pertahanan Indonesia yang terbagi dalam pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan militer tidak dapat digunakan untuk menghadapi ancaman nirmiliter karena ancaman nirmiliter bersifat non-konvensional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga penelitian terdahulu. Pertama, publikasi Hendra Manurung pada konferensi dengan tema "*The Golden Triangle*" di Semarang dengan judul "*Securing Southeast Asian Regional Security: Indonesia Diaspora*". Seiring dengan suksesnya diaspora Tiongkok, Indonesia saat ini mencoba untuk merangkul warganya dan keturunannya yang tersebar di penjuru dunia. India dan Tiongkok mengawali peningkatan pertumbuhannya dengan mendayagunakan diaspora globalnya. Jutaan warga India dan Tiongkok yang tinggal di negara lain dan telah sukses mengirimkan milyaran dolar kembali ke kampung halamannya serta menyumbangkan keahliannya untuk pembangunan kampung halamannya. Indonesia juga mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimiliki warganya yang berada di luar negeri. Hal ini yang mendasari kongres diaspora Indonesia

pertama yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2012 di Los Angeles. Duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat saat itu, Dino Pati Djalal menyatakan bahwa sejauh ini warga Indonesia yang berada di luar negeri secara umum diabaikan. Kongres yang dihadiri diaspora-diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara lain, merupakan langkah besar untuk mengawali terjalinnya ikatan yang kuat antara diaspora Indonesia dengan kampung halamannya. Dino juga menambahkan bahwa kongres seperti itu dapat membangun persahabatan dan semangat kebersamaan antar sesama kelompok-kelompok diaspora Indonesia. Pemerintah juga berharap bahwa kongres dapat membangkitkan kesadaran antara diaspora Indonesia untuk bersinergi dengan warga negara Indonesia di kampung halaman. Dengan demikian, kongres dapat mendorong terjalinnya hubungan sosial dan ekonomi antara Indonesia dengan dunia. Diaspora Indonesia dapat berperan sebagai semacam jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain dan dalam dinamika ekonomi global. Hal ini penting dilakukan dalam menyikapi globalisasi dan kondisi dunia saat ini serta dapat memberikan keuntungan ekstra bagi Indonesia. Diaspora Indonesia dapat memegang peranan penting dalam pertumbuhan berkelanjutan dan perkembangan negara. Beberapa diantara diaspora tersebut telah sukses dan tinggal di wilayah yang jauh dari Indonesia sehingga dapat membentuk jaringan pemikir (*brain power*) dan modal yang semakin terbentang luas dan dapat memperkuat diplomasi informal (*track two diplomacy*) kita (Manurung, 2015).

Sebagai salah satu penelitian terdahulu, penelitian ini sudah menjelaskan mengenai keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan negara, khususnya di bidang ekonomi, dengan diaspora. Namun penelitian ini terlalu berfokus pada kerja sama antar pemerintah yang mampu diinisiasi atau didukung oleh diaspora, serta kepada hal-hal yang dapat negara dapatkan dari pemberdayaan diaspora dan tidak mengkaji perspektif diaspora itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kekurangan penelitian ini adalah tidak adanya pandangan dari

diaspora yang mampu menjelaskan kesamaan keinginan pemerintah dengan keinginan diaspora sehingga program yang mungkin dilakukan dapat terlaksana dengan baik.

Penelitian berikutnya merupakan jurnal tulisan O. Can Unver yang dimuat dalam *Turkish Policy Quarterly*. O. Can Unver menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah Turki terhadap warga negaranya yang melakukan migrasi untuk bekerja di eropa sejak awal 1960-an mulai berubah sejak awal 1980-an. Perubahan kebijakan lainnya juga terjadi melalui upaya-upaya aktif pemerintah Turki untuk menjalin hubungan yang erat antara pemerintah dengan komunitas warga Turki yang tinggal di negara lain. Infrastruktur institusional yang didirikan bertujuan untuk membangun kesamaan antar diaspora Turki yang sejalan dengan kepentingan Turki serta memiliki pengaruh terhadap dinamika politik negara tujuan (*host countries*). Namun ada juga beberapa kasus intervensi pemerintah Turki terhadap urusan-urusan yang melibatkan komunitas diaspora Turki di negara lain yang menghasilkan kontroversi. Contohnya adalah pesan Perdana Menteri Turki terhadap komunitas diaspora Turki di Jerman dan penggerakan diaspora Turki di Perancis untuk menentang undang-undang genosida di negara itu (Ünver, 2013).

Keunggulan dari penelitian ini adalah terjelaskannya efek-efek yang mungkin dapat diraih dari eratnya hubungan antara negara kampung halaman (*home country*) dengan komunitas diasporanya melalui contoh kasus Turki. Namun sinergi dari kedua komponen tersebut tidak terjamin ada karena belum dijelaskan perspektif dari diaspora Turki apakah setuju atau tidak setuju terhadap kepentingan pemerintah tersebut.

Ketiga penelitian bertajuk *The New Turkish Diaspora Policy* oleh Yaşar Aydın. Aydın menyatakan bahwa kebijakan diaspora Turki merupakan hasil dari meningkatnya ketertarikan pemerintah Turki terhadap diasporanya. Pembeneran terhadap strategi kebijakan diaspora ini merupakan cerminan ideologi pemerintahan dengan AKP sebagai partai berkuasa di Turki dalam menyikapi perkembangan situasi global yang membuat Turki merasa perlu mereposisi diri melalui penggunaan

potensi ekonomi dan politik diaspora Turki yang tersebar di penjuru dunia. Diaspora Turki di Jerman telah berhasil memperoleh kapasitas politik dalam beberapa tahun belakangan ini dan memiliki prospek perkembangan yang luas sejalan dengan kepentingan ekonomi dari kebijakan luar Negeri Turki (Aydın, 2014).

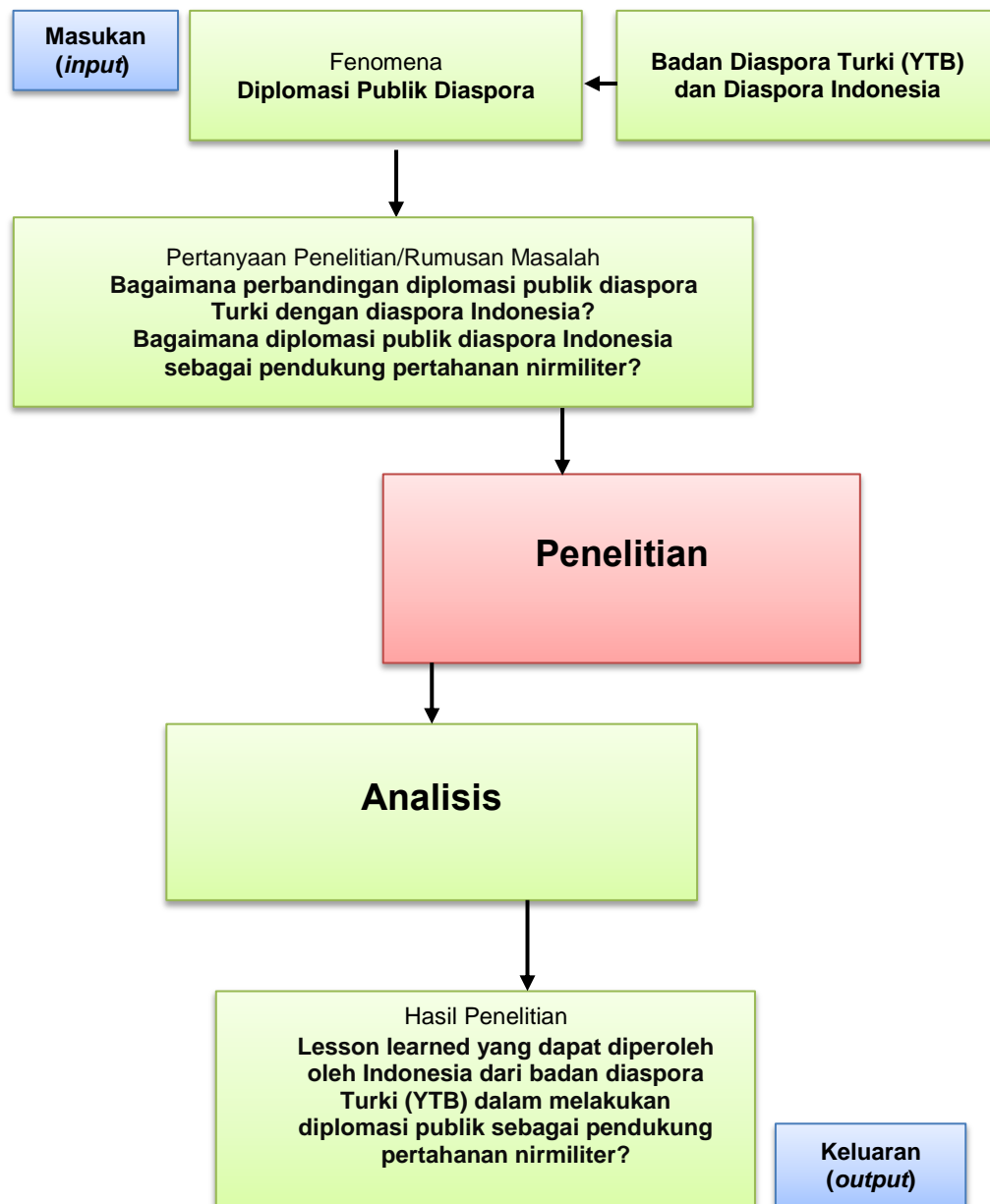
Penelitian ini sekaligus mempertegas pendapat Unver. Selain itu, penelitian ini juga memberikan beberapa sudut pandang dari negara tujuan (dalam hal ini Jerman) tetapi masih belum meninjau dan membahas sudut pandang dari diaspora Turki terkait sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan guna mengkajinya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Proses masukan (*input*) dalam penelitian ini terdiri dari fenomena yang menjadi objek penelitian dan pertanyaan penelitian. Proses penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga bagian yang meliputi posisi penelitian, metode penelitian, dan analisis data. Posisi penelitian dibentuk berdasarkan konsep, teori, dan penelitian terdahulu sebagai acuan yang kemudian dikembangkan dalam metodologi penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dalam membandingkan diplomasi publik yang dilakukan Turki melalui Badan Diaspora Turki (YTB) dengan diplomasi publik yang dilakukan diaspora Indonesia. Proses pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis sebagai bagian terakhir dalam proses penelitian.

Hasil dari analisis data tersebut akan menjadi keluaran (*output*) penelitian. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai diplomasi publik yang dilakukan diaspora sebagai pendukung pertahanan nirmiliter. Hasil penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti, 2016